

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Dalam rangka menganalisis pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja dengan Akuntabilitas sebagai variabel pemediasi, dilakukan pengumpulan data Politik Dinasti yang tercermin dari data daerah yang terindikasi politik dinasti yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang tercermin dari data Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kinerja yang dicerminkan oleh Skor evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, serta Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah yang dicerminkan dengan opini audit LHP BPK RI.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Pemerintah Daerah yang menjalankan praktik Politik Dinasti tahun kepemimpinan 2012 – 2015 sebelum dijalankannya Pemilu serentak. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari populasi tersebut kemudian ditentukan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Sampel penelitian yang diperoleh 27 Daerah yang menjalankan Politik Dinasti ditambah 27 Daerah

pembandingan yang tidak menjalankan Politik Dinasti. Berikut perincian proses pengambilan sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
RINGKASAN PENGAMBILAN SAMPEL

Kriteria Sampel	Jumlah
Kabupaten/Kota yang terindikasi menjalankan praktik Politik Dinasti TA 2012/2015	108
Kabupaten/Kota yang tidak dimuat skor Kinerja oleh Kemendagri	(3)
Kabupaten/Kota yang yang tidak memiliki skor pelanggaran SPI dalam LHP BPK RI	(78)
Jumlah Sampel terpilih	27
Kabupaten/Kota yang menjadi sampel pembandingan (<i>matched Sampling</i>)	27
Jumlah Data sampel yang diolah	54

Sumber: hasil pengolahan data 2018

Berdasarkan tabel sampel penelitian di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang terindikasi menjalankan praktik politik dinasti TA 2012-2015 berjumlah 27 daerah, sehingga daerah yang terpilih menjadi daerah pembandingan (*matched sampling*) juga sejumlah 27 daerah.

Setelah dilakukan uji normalitas data, seluruhnya data berdistribusi normal sehingga jumlah data yang diolah dengan model regresi dalam penelitian ini berjumlah 54 data.

B. Uji Kualitas Instrumen Dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan *standard deviation* untuk setiap variabel penelitian. Adapun hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
DESKRIPSI STATISTIK DATA PENELITIAN
Statistics

		POLITIK DINASTI	PENGENDALI AN INTERNAL	AKUNTAB ILITAS	KINERJA
N	Valid	54	54	54	54
	Missing	0	0	0	0
Mean			.333333	3.814815	2.725598
Median		1.000000	.333333	3.000000	2.731200
Std. Deviation		.5015699	.3237620	1.1001556	.3723196
Minimum		.0000	.0000	1.0000	1.6286
Maximum		1.0000	1.0000	5.0000	3.2908
Percentiles	25	.000000	.000000	3.000000	2.526100
	50	1.000000	.333333	3.000000	2.731200
	75	1.000000	.416667	5.000000	3.034775

Sumber: Output SPSS, 2017

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian sebanyak 54 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel Politik Dinasti yang diprosikan dengan status kepemimpinan dengan menggunakan variabel *dummy* memiliki nilai minimum 0 untuk daerah yang tidak terindikasi politik dinasti dan nilai maksimum 1 untuk daerah yang terindikasi menjalankan praktik politik dinasti.

2. Variabel Sistem Pengendalian Internal menggunakan skor penegakan SPI di lingkungan pemerintah daerah sebagai proksi dengan rasio penegakan sebagai metode perhitungan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum sebesar 1,0000. Hal tersebut menunjukkan penegakkan SPI di lingkungan pemerintah daerah yang dijadikan sampel paling sedikit sebesar 0,0000 dan penegakan paling tinggi memiliki nilai 1,0000. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3333 berada di dekat angka median sebesar 0,3333 atau *percentile* 50 dan dibawah *percentile* 75, hal itu menunjukkan tingkat penegakan SPI yang cukup rendah di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu juga diketahui terdapat penyimpangan data yang kecil ditunjukkan dengan nilai *standard deviation* 0, 3237620 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).
3. Variabel Akuntabilitas yang diproksikan dengan opini audit laporan keuangan menggunakan skala ordinal sebagai perhitungan dalam mengukur tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5 karena menggunakan skala ordinal 1-5. Memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,8148 lebih besar dari nilai median 3,00 atau *percentile* 50 dan dibawah *percentile* 75, hal ini menunjukkan tingkat perolehan opini audit yang didominasi memperoleh WDP (Wajar Dengan Pengecualian), sehingga semakin tinggi tingkat perolehan opini audit semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelaporan di pemerintahan daerah.

Dapat diketahui juga penyimpangan data yang kecil karena nilai *standard deviation* sebesar 1,1001 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

4. Variable Kinerja yang diproksikan skor Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterbitkan Kemendagri memiliki nilai minimum sebesar 1,6286 dengan nilai maksimum sebesar 3,2908 hal ini menunjukkan data skor kinerja yang dijadikan sampel penelitian sebesar 1,6286 – 3,2908. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,725598 sama besar dengan nilai median 2,731200 atau nilai percentile 50 dan dibawah percentile 75, hal tersebut menunjukkan perolehan skor kinerja dari pemerintah daerah yang dijadikan sampel cukup tinggi. Dapat diketahui juga penyimpangan yang kecil ditunjukkan dengan nilai *standard deviation* sebesar 0,3723196 lebih kecil dari rata-rata (*mean*).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.3 yaitu sebagai berikut:

1) Substruktur 1

Tabel 4.3
UJI NORMALITAS DATA
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99341326
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.091
	Negative	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		.855
Asymp. Sig. (2-tailed)		.458

Sumber: Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,458 > \alpha (0,05)$ yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal dan model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

2) Substruktur 2

Tabel 4.4
UJI NORMALITAS DATA
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33788148
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.064
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.569
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902

Sumber: Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,902 > \alpha (0,05)$ yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal dan model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel independen pada model regresi. Uji multikolinieritas melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* jika nilai *tolerance* menunjukkan angka $> 0,1$ dan VIF menunjukkan angka < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dalam Tabel dibawah sebagai berikut:

1) Substruktur 1

Tabel 4.5
UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.849	.242		15.894	.000		
POLITIK DINASTI	-.715	.279	-.326	-2.561	.013	.986	1.014
PENGENDALIAN INTERNAL	1.089	.433	.320	2.517	.015	.986	1.014

Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Sumber: Output SPSS, 2017

Tabel 4.5. menunjukkan nilai *tolerance* untuk semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variabel independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

2) Substruktur 2

Tabel 4.6
UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	2.457	.203		12.104	.000		
POLITIK DINASTI	-.049	.102	-.066	-.480	.633	.874	1.144
PENGENDALIAN INTERNAL	.420	.158	.366	2.668	.010	.878	1.140
AKUNTABILITAS	.041	.048	.121	.849	.400	.815	1.226

Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Output SPSS, 2017

Tabel 4.6. menunjukkan nilai *tolerance* untuk semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variable independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 dibawah sebagai berikut:

1) Substruktur 1

Tabel 4.7
UJI HETEROSKEDASTISITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.858	.135		6.366	.000
POLITIK DINASTI	.031	.155	.028	.202	.841
PENGENDALIAN INTERNAL	-.179	.241	-.104	-.743	.461

Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, 2017

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

2) Substruktur 2

Tabel 4.8
UJI HETEROSKEDASTISITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.409	.113		3.629	.001
POLITIK DINASTI	.018	.057	.047	.321	.749
PENGENDALIAN INTERNAL	-.105	.088	-.174	-1.197	.237
AKUNTABILITAS	-.029	.027	-.164	-1.094	.279

Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, 2017

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa semua variable independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan

demikian, model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Hasil uji autokorelasi tersebut disajikan pada tabel 4.9 berikut:

1) Substruktur 1

Tabel 4.9
UJI AUTOKORELASI
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.430(a)	.185	.153	1.0127046	1.510

Predictors: PENGENDALIAN INTERNAL, POLITIK DINASTI

Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Sumber: Output SPSS 2017

Tabel 4.9. menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.51 yang terletak diantara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

2) Substruktur 2

Tabel 4.10
UJI AUTOKORELASI
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.420(a)	.176	.127	.3478703	1.840

Predictors: AKUNTABILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL, POLITIK DINASTI

Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Output SPSS 2017

Tabel 4.10. menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,840 yang terletak diantara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

C. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

a. Substruktur 1

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.430(a)	.185	.153	1.0127046

Predictors: PENGENDALIAN INTERNAL, POLITIK DINASTI

Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Sumber: Output SPSS 2017

Tabel 4.11 menunjukkan besarnya *adjusted R²* sebesar 0,153, hal ini berarti 15,3% variabel Akuntabilitas dapat dijelaskan oleh 2 variabel independen Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal, sedangkan

sisanya ($100\% - 15,3\% = 84,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

b. Substruktur 2

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.420(a)	.176	.127	.3478703

Predictors: AKUNTABILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL, POLITIK DINASTI

Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Output SPSS 2017

Tabel 4.12 menunjukkan besarnya *adjusted R²* sebesar 0,127, hal ini berarti 12,7% variabel Kinerja dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen Politik Dinasti, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas sedangkan sisanya ($100\% - 12,\% = 87,3\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) disajikan dalam tabel 4.13 dan 4.14 berikut:

a. **Substruktur 1**

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.849	.242		15.894	.000
POLITIK DINASTI	-.715	.279	-.326	-2.561	.013
PENGENDALIAN INTERNAL	1.089	.433	.320	2.517	.015

Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Sumber: Output SPSS, 2017

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Akt} = - 0.326\mathbf{PD} + 0.320\mathbf{SPI} + \varepsilon$$

- 1) Koefisien regresi politik dinasti sebesar 0,326 dan bernilai negatif menyatakan bahwa setiap adanya pemerintahan daerah yang menjalankan praktik politik dinasti akan menurunkan tingkat akuntabilitas sebesar -0,326.
- 2) Koefisien regresi sistem pengendalian internal 0,320 dan bernilai positif menyatakan bahwa setiap bertambahnya penegakan SPI pada suatu pemerintahan daerah akan meningkatkan tingkat akuntabilitas sebesar 0,320.

b. Substruktur 2

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.457	.203		12.104	.000
	POLITIK DINASTI	-.049	.102	-.066	-.480	.633
	PENGENDALIAN INTERNAL	.420	.158	.366	2.668	.010
	AKUNTABILITAS	.041	.048	.121	.849	.400

Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Output SPSS, 2017

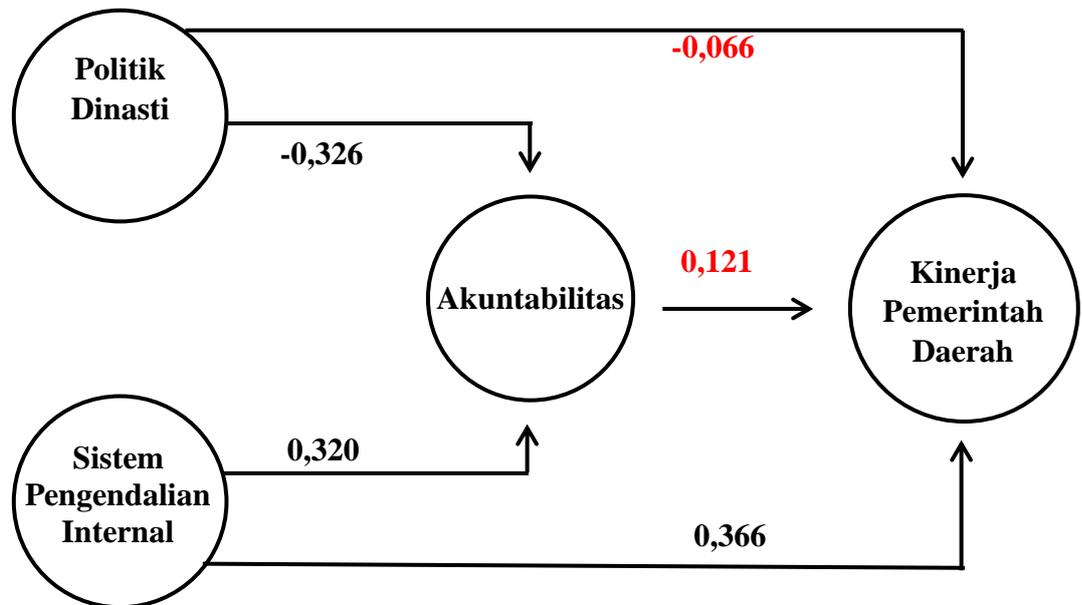
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Knj = - 0,066PD + 0,366SPI + 0,121Akt + \varepsilon}$$

- 1) Koefisien regresi politik dinasti sebesar 0,066 dan bernilai negatif menyatakan bahwa setiap adanya pemerintah daerah yang menjalankan praktik politik dinasti dapat menyebabkan menurunnya tingkat capaian skor kinerja sebesar – 0,066.
- 2) Koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0,366 dan bernilai positif menyatakan bahwa setiap bertambahnya penegakan SPI pada suatu pemerintahan daerah akan meningkatkan skor kinerja sebesar 0,366.
- 3) Koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,121 dan bernilai positif menyatakan bahwa setiap bertambahnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menaikkan capaian skor kinerja sebesar 0,121.

3. Uji Path Analysis

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13. dan 4.14. maka di dapat kan hasil untuk uji *path analysis* sebagai berikut:



Gambar 4.1
Hasil Uji *Path Analysis*

a. Politik Dinasti terhadap Kinerja dengan Akuntabilitas sebagai variabel intervening

Pengaruh Akuntabilitas yang memediasi Politik dinasti terhadap Kinerja secara tidak langsung terjadi apabila nilai signifikansi Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas $< 0,05$ dan perbandingan pengaruh tidak langsung yaitu *standardize coefficient* dari Politik Dinasti ke Akuntabilitas (ρ_1) dikalikan dengan *standardize coefficient* dari Akuntabilitas ke Kinerja (ρ_4) lebih besar sama dengan kuadrat dari pengaruh langsung yaitu Politik Dinasti ke Kinerja (ρ_3) atau dapat ditulis $(\rho_1 * \rho_4) \geq \rho_3^2$.

Diketahui nilai signifikansi Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas sebesar $0,013 < 0,05$ dan hasil dari $(\rho_1 * \rho_4)$ atau $(-0,326 * 0,121)$, adalah $-0,039446$ sedangkan hasil dari ρ_3^2 yaitu $(-0,066)^2$ adalah $0,004356$ sehingga $(\rho_1 * \rho_4) \leq \rho_3^2$. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas bukan merupakan variabel intervening yang memediasi Politik Dinasti terhadap Kinerja. Dengan demikian H_6 **ditolak**.

b. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja dengan Akuntabilitas sebagai variabel intervening

Pengaruh Akuntabilitas yang memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja secara tidak langsung terjadi apabila nilai signifikansi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas $< 0,05$ dan perbandingan pengaruh tidak langsung yaitu *standardize coefficient* dari Sistem Pengendalian Internal ke Akuntabilitas (ρ_2) dikalikan dengan *standardize coefficient* dari Akuntabilitas ke Kinerja (ρ_4) lebih besar sama dengan kuadrat dari pengaruh langsung yaitu Sistem Pengendalian Internal ke Kinerja (ρ_5) atau dapat ditulis $(\rho_2 * \rho_4) \geq \rho_5^2$.

Diketahui nilai signifikansi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas sebesar $0,015 < 0,05$ dan hasil dari $(\rho_1 * \rho_4)$ atau $(0,320 * 0,121)$, adalah $0,03872$ sedangkan hasil dari ρ_3^2 yaitu $(0,366)^2$ adalah $0,133956$ sehingga $(\rho_2 * \rho_4) \leq \rho_5^2$. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas bukan merupakan variabel intervening yang memediasi

Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja. Dengan demikian H₇ ditolak.

Tabel 4.16.
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Praktik Politik Dinasti Berpengaruh Negatif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Di Pemerintah Daerah	<u>Diterima</u>
H2	Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Di Pemerintah Daerah	<u>Diterima</u>
H3	Politik Dinasti Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<u>Ditolak</u>
H4	Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<u>Ditolak</u>
H5	Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<u>Diterima</u>
H6	Akunabilitas Pelaporan Memediasi Pengaruh Positif Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<u>Ditolak</u>
H7	Akunabilitas Pelaporan Memediasi Pengaruh Positif Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<u>Ditolak</u>

D. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian skor Kinerja Pemerintah Daerah yang digambarkan oleh pengaruh yang terjadi antara adanya Politik Diansti dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah daerah yang di mediasi oleh Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen diatas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

adalah adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di dalam organisasi tersebut. Sementara itu, adanya praktik Politik Dinasti dan pencapaian tingkat Akuntabilitas justru tidak bisa berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1. Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan pada tabel 4.13 hasil analisis Politik Dinasti dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan Politik Dinasti dapat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar -0,715, dengan signifikansi sebesar $0,013 < \alpha (0,05)$ sehingga menunjukkan Politik Dinasti berkorelasi dan memiliki arah negatif terhadap Akuntabilitas. Hasil ini konsisten dengan penelitian Irmawati (2015) dan Nuritomo dan Rossieta (2014) yang menjelaskan bahwa praktik politik tersebut dapat mengancam bentuk akuntabilitas pemerintah untuk dapat mewujudkan adanya *Good Governance* yang baik bagi organisasi pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan logika peneliti bahwa dengan berjalannya praktik politis tersebut akan tercipta suatu hubungan-hubungan istimewa pada posisi-posisi strategis di dalam organisasi tersebut yang akan mengurangi tingkat pengawasan atasan terhadap tugas-tugas yang dijalankan bawahannya. Kurangnya pengawasan yang diberikan manajemen puncak dapat menyebabkan menurunnya kinerja dan menghasilkan pelaporan yang kurang

optimal sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi didalamnya. Dapat disimpulkan hipotesis 1 yang menyatakan praktik politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan di pemerintah daerah, **diterima**.

2. Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan pada tabel 4.13 hasil analisis Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan Sistem Pengendalian Internal tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 1,089, dengan signifikansi sebesar $0,015 > \alpha (0,05)$ sehingga hasil tersebut menunjukkan Sistem Pengendalian Internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas.

Hasil ini sejalan dengan logika peneliti bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan salah satu item yang diteliti oleh BPK untuk menghasilkan sebuah opini audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Sistem Pengendalian Internal yang diteliti memiliki tiga aspek besar yaitu, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern dimana dalam setiap aspek tersebut terdapat beberapa komponen SPI yang lebih rinci menjelaskan setiap pelanggaran SPI yang ada pada suatu pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan angka jumlah pelanggaran terhadap 3 aspek SPI yang terdapat didalam LHP BPK dengan menginfers jumlah item SPI terhadap jumlah pelanggaran terhadap SPI tersebut, sehingga nantinya akan ditemukan jumlah penegakan SPI di setiap Pemda yang diungkapkan pada laporan tersebut. Semakin banyak jumlah pelanggaran SPI yang ditemukan, hal tersebut akan semakin menurunkan jumlah penegakan SPI yang dilakukan oleh Pemda tersebut. Hal tersebut dapat semakin menurunkan tingkat pencapaian opini audit atas laporan keuangan Pemda tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pelaporan suatu Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dijelaskan semakin baik penegakan SPI yang dijalankan suatu pemerintah daerah dengan rendahnya tingkat pelanggaran terhadap SPI akan semakin meningkatkan tingkat pencapaian opini audit BPK sebagai wujud akuntabilitas pelaporan yang baik dari suatu pemerintah daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Armando (2013), Andarinin (2015) dan Rudiyanisya (2017) yang menyatakan bahwa secara empiris membuktikan bahwa SPI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap probabilitas memperoleh opini audit BPK-RI. Dapat disimpulkan hipotesis 2 yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pelaporan di pemerintah daerah, **diterima**.

3. Politik Dinasti terhadap Kinerja

Berdasarkan pada tabel 4.14 hasil analisis Politik Dinasti dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan Politik Dinasti tidak

dapat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar $-0,026$, dengan signifikansi sebesar $0,803 > \alpha$ ($0,05$) sehingga menunjukkan Politik Dinasti tidak berkorelasi, namun memiliki arah negatif terhadap Kinerja. Hasil ini konsisten dengan penelitian Adzani & Martani (2014), Nuritomo & Rossieta (2014) dan Irmawati (2015) yang menjelaskan bahwa daerah dengan praktik politik dinasti hanya akan mengandalkan pendapatan yang didominasi oleh pusat sehingga kinerja dalam peningkatan pendapatan tidak nampak. Sehingga, semakin banyak hubungan istimewa yang ada di dalam organisasi tersebut akan semakin menurunkan kreatifitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

Hasil tersebut sejalan dengan logika peneliti dibuktikan dengan hasil pengujian yang arahnya negatif, bahwa kepemimpinan yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung akan memperkuat kelompoknya sendiri dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan strategis yang dimilikinya. Serta, praktik politik dinasti cenderung akan meningkatkan potensi terjadinya korupsi pada pemerintahan tersebut. Namun seperti yang ditemukan oleh Mendoza dkk (2012) bahwa prevalensi politik dinasti tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang tinggi, standar hidup yang rendah atau pembangunan manusia. Meskipun politik dinasti memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilu dibandingkan calon lain, namun tidak semua calon yang berlatar belakang politik dinasti berkulitas rendah dan tidak

kompeten karena calon dari keluarga yang berlatar belakang politik dinasti sudah mengikuti dan memenuhi persyaratan sehingga layak untuk menjadi kepala daerah yang terpilih. Dapat disimpulkan hipotesis 3 yang menyatakan politik dinasti berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, **ditolak**.

4. Akuntabilitas terhadap Kinerja

Berdasarkan pada tabel 4.14 hasil analisis Akuntabilitas dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan variabel Akuntabilitas tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,072 dengan signifikansi sebesar $0,128 > \alpha$ (0,05) sehingga menunjukkan Akuntabilitas tidak berkorelasi, namun memiliki arah positif terhadap Kinerja.

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Nuritomo & Rossieta (2014), Masdiantini dan Erawati (2016) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin baik opini audit maka semakin mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini TW (Tidak Wajar) dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat).

Penelitian serupa lainnya menjelaskan hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013)

yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang baik tidak dapat menjadi jaminan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah bagus. Opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bagusnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), apakah laporan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah telah dibuat dengan sewajarnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses audit yang dilakukan hanya mengambil beberapa sampel bukan secara keseluruhan yang diperiksa karena terbatasnya waktu. Dapat disimpulkan hipotesis 4 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, **ditolak**.

5. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja

Berdasarkan pada tabel 4.14 hasil analisis Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan Sistem Pengendalian Internal dapat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,679, dengan signifikansi sebesar $0,034 < \alpha$ (0,05) sehingga hasil tersebut menunjukkan Sistem Pengendalian Internal

terbukti mempunyai arah positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil ini sejalan dengan logika peneliti bahwa dengan penegakan aturan yang baik didalam organisasi maka akan mengurangi berbagai penyimpangan-penyimpangan dan akan menciptakan iklim organisasi yang baik dalam menjalankan tugas-tugas setiap individu didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai *guidance* bagi setiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah akan akuntabel dan transparan, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan penyimpangan salah satunya anggaran daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kusumawardani (2015), Afrida (2013), Rosita (2014), Dewi, dkk (2015) dan Trihapsoro (2015) yang menjelaskan bahwa temuan audit dengan proksi nilai temuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi. Semakin baik SPI yang dijalankan di pemerintah daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan Pemda tersebut. Dapat disimpulkan hipotesis 5 yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, **diterima**.

6. Politik Dinasti terhadap Kinerja dengan akuntabilitas sebagai pemediasi

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Akuntabilitas bukanlah variabel intervening antara Politik Dinaasti dengan Kinerja, hal ini dikarenakan Akuntabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap Kinerja walaupun pada pengujian sebelumnya Politik Dinasti dapat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penjelasan yang diungkapkan dalam penelitian Kautsar (2015) yang menyebutkan bahwa pengaruh buruk dari adanya praktik politis tersebut dapat diredam dengan adanya tata pelaporan yang baik dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik.

Tidak berpengaruhnya Akuntabilitas dalam hubungan politik dinasti terhadap kinerja disebabkan karena tingkat akuntabilitas yang diperoleh pemerintah daerah dapat berupa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas, WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) dan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat). Walaupun politik dinasti terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas, namun pemerintah daerah tersebut memperoleh opini TW atau bahkan TMP maka kinerja yang tercipta akan kurang maksimal. Begitu juga sebaliknya ketika opini audit yang terima pemerintah daerah berupa WTP atau WDP maka dapat memungkinkan adanya kinerja yang baik di dalam organisasi tersebut.

Sehingga, tidak selamanya politik dinasti yang tercipta di suatu pemerintahan daerah dapat menjalankan kinerja pemerintahan dengan baik yang dipengaruhi oleh raihan opini audit BPK yang maksimal.

7. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja dengan Akuntabilitas sebagai pemediasi

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Akuntabilitas bukanlah variabel intervening antara Sistem Pengendalian Internal dengan Kinerja pemerintahan, hal ini dikarenakan Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas dan akuntabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sarita (2012) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Bentuk-bentuk yang dijelaskan seperti efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan bagian-bagian penting dalam memperoleh opini audit yang maksimal dalam mencapai tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak berpengaruhnya Akuntabilitas dalam hubungan sistem pengendalian intern terhadap kinerja disebabkan karena dalam pengukuran opini audit tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pelanggaran SPI namun terhadap temuan-temuan lain yang diungkap dalam laporan audit yang diterbitkan BPK-RI. Hubungan tersebut didukung oleh tidak berpengaruhnya Akuntabilitas terhadap kinerja yang disebabkan oleh pengukuran kinerja yang

didasarkan pada LPPD Opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bagusnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), apakah laporan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah telah dibuat dengan sewajarnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses audit yang dilakukan hanya mengambil beberapa sampel bukan secara keseluruhan yang diperiksa karena terbatasnya waktu.